PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS GRESIK TAHUN 2015-2016)

SKRIPSI

Oleh:

Kresna Ramadha Candra

NIM: C74213114

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Kresna Ramadha Candra
NIM	: C74213114
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Desember 2017

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

F8C06AEF872185848

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kresna Ramadha Candra

C7213114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Kresna Ramadha Candra ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Desember 2017

Pembimbing,

Imam Buchori, SE, M.Si
NIP:196809262000031001

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kresna Ramadha Candra NIM. C74213114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II,
Imam Buchori, SE, M.Si	Dr. Hj. Fatmah, ST, MM
196809262000031001	197507032007012020
Penguji III,	Penguji IV,
Siti Rumilah, M.Pd	Akh. Yunan Atho'illah, M.Si
197607122007102005	198101052015031003

Surabaya, Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D

NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kresna Ramadha Candra
NIM : C74213114
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : rama.esc@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS GRESIK TAHUN 2015-2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Penulis

(Kresna Ramadha Candra)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ”**Prinsip Akuntabilitas dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZ Gresik Tahun 2015-2016**” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di Badan Amil Zakat Gresik dan kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK di Badan Amil Zakat Gresik.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan informan, dimana dalam penelitian ini yaitu para karyawan Badan Amil Zakat Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas BAZ Gresik sebagai Badan Amil Zakat dituangkan dalam mekanisme kerja yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menitikberatkan pada kualitas transparansi. Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga baik berupa pengumpulan atau pendistribusian, BAZ Gresik selalu memberikan tanda terima berupa kuitansi. Perbedaannya jika dalam pengumpulan ketika individu menyalurkan dananya akan diberi rekap hingga satu tahun, namun jika lembaga tidak akan diberikan rekapan hingga satu tahun penuh, hanya saat penyaluran saat itu saja.

Perlu kiranya pengelolaan website lebih baik lagi dan selalu menyajikan hal-hal terbaru agar supaya masyarakat tahu apa saja kegiatan BAZNAS Gresik, program kerja, pelatihan, dll yang tentunya berguna untuk perbaikan BAZNAS Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 14

G. Kegunaan Hasil Penelitian 14

H. Definisi Operasional 15

J. Metode Penelitian 16

K. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* 24

1. Definisi *Good Corporate Governance* 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah *Good Corporate Governance* 27
3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* 32
4. *Good Corporate Governance* Menurut Islam..... 35
5. Akuntabilitas..... 36
B. PSAK 109 42
1. Pengakuan dan Pengukuran 42
2. Penyajian 45
3. Pengungkapan 46
BAB III DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Gresik 49
1. Profil..... 49
2. Visi, Misi Dan Azas Pengelolaan BAZ Gresik..... 51
3. Struktur Organisasi 55
4. Program Pendistribusian..... 59
B. *Good Corporate Governance* 64
1. Ketentuan *Good Corporate Governance*..... 66
2. Kontribusi Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109..... 68
C. Implementasi PSAK 109 69
1. Ketentuan PSAK 109 69
2. Implementasi PSAK 71
BAB IV ANALISA PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 .....
A. Analisis Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi 74
B. Kontribusi Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi 78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 80
B. Saran-saran 81
DAFTAR PUSTAKA 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital seperti saat ini, tak bisa dipungkiri bahwa kecepatan dan kemudahan dalam mengakses sebuah informasi menjadi primadona tersendiri bagi hampir semua lapisan masyarakat. Hal ini yang tak mau dilewatkan begitu saja oleh lembaga keuangan syariah untuk sekedar mengenalkan, memasarkan sampai pada proses penyampaian laporan kinerja perusahaan. Namun, mengingat semakin *masive* dan kritis masyarakat dalam memandang suatu permasalahan, sebuah lembaga keuangan syariah dituntut untuk menerapkan *good corporate governance* dalam arah gerak usahanya.

Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.[1] Dari pengertian *good corporate governance* diatas dapat dimaknai bahwa sebuah tata kelola perusahaan yang baik menyangkut transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan *fairness*.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan. Akuntabilitas

[1] Muhammad dan Lukaman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga/organisasi berjalan dengan efektif. Responsibilitas, lembaga organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sehingga terjaga kesinambungan lembaga. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perilaku adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas didasarkan pada kompetensi individu, pengalaman, serta kemauan keras untuk mengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Sementara, dari sisi pelaksanaan (operasional) tanggung jawab adalah kriteria utama. Dari beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan berbagai institusi, terlihat bahwa prinsip yang melandasi sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional.

Akuntabilitas adalah memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan pembuatan keputusan, mengacu jadwal yang ditetapkan dan menerapkan

[2] Ova Kurniawan, *Project Assigment Reeport: Menigkatkan Implementasi Good Corporate Governance,* (Jakarta: PT PLN Persero, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efisiensi dan efektifitas biaya pelaksanaan tugasnya.[3] Akuntabilitas merupakan bentuk dari kejelasan struktur dan fungsi perusahaan yang harus dikelola secara benar sesuai kepentingan *stakeholder*. Selain membahas kejelasan struktur dan fungsi, akuntabilitas juga membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis adalah sebuah pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk kegiatan berinteraksi dengan seluruh *stakeholder*.[4] Rumusan etika bisnis dijabarkan lebih lanjut dalam kode etik (*code of conduct*) perusahaan. kode etik mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

Zakat merupakan bentuk peribadahan seorang hamba kepada Allah yang mengandung dua dimensi, yaitu spiritual dan sosial. Artinya, zakat secara spiritual merupakan instrumen yang ditawarkan oleh Islam kepada seorang muslim ketika telah memenuhi *nisab* dan sampai waktunya satu tahun dalam upaya optimalisasi proses peribadahan seorang hamba kepada Allah. Sedangkan secara sosial, zakat bertujuan untuk pemerataan pendapatan. Al-Qur'an mengabadikan anjuran untuk menunaikan zakat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:[5]

وَأَقِيمُوا الصلاةَ وأْتوا الزكاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

[3] Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberasilan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), 410.
[4] Jessica Ayu Meirna Sitepu, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT. Bulan Terang Utama", *Agora*, Vol. 4, No. 1, (2016), 2.
[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Ayat diatas menjelaskan urgensi zakat dalam perspektif ketaatan kehidupan seorang muslim. Jika sholat adalah bentuk penghambaan secara vertikal dengan Allah, maka zakat adalah bentuk penghambaan kepada Allah dengan cara horizontal yang mengarah kepada sesama manusia. Dampak lebih jauh dari menunaikan zakat bagi seorang muslim adalah meningkatkan kualitas spiritual, membersihkan atau mensucikan jiwa, memberkahkan harta yang dimiliki, serta meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan dalam islam adalah penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.[6] Secara sederhana dapat digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan (*surplus*) yang diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan (*insentif*) untuk kekayaan pihak berkekurangan.[7] Disisi lain, jika dikelola dengan akuntansi yang baik dan amanah, maka zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja umat, serta dapat menjadi institusi pemerataan ekonomi.

---

[6] Ibid., 129.
[7] Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplkasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk bertujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah berasal dari orang islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut *muzakki*.

Fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah didirikan adalah untuk membantu umat muslim dalam rangka menyalurkan dana zakat dan infak/sedekahnya. Dana yang dikumpulkan dari *muzaki* disalurkan untuk beberapa golongan yang sudah ditentukan sesuai syariah. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan motode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan serta merangsang minat masyarakat untuk berwirausaha.[8] Tujuan akhir dari zakat produktif ini tak hanya sampai memeratakan distribusi kekayaan melainkan juga akan meminimalisir angka kriminalitas sebagai dampak dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

[8] Arif Maslah, "Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)", (Skripsi—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Qur'an menjelaskan dalam surat At Taubah ayat 60 beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Isi ayat tersebut sebagai berikut:[9]

إِنَمَا الصدَقَاتُ لِلْفُقَرآءِ وَالْمَساكِنِ وَالعَالِمِيْنَ عَلَيْهَا والمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ

وَفِى سسَبِيْلِ اللهِ وابْنِ السَّبِيْلِ, فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ. وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌز

> Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatiya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sudah seharusnya organisasi zakat mengelola dana zakat dan infak/sedekah dengan baik sesuai ketetapan yang sudah disepakati bersama. Pengelola dalam hal ini adalah amil zakat, berperan penting dalam terselenggaranya distribusi dana yang tepat. Pengetahuan serta tingkat spiritualitas yang baik menjadi acuan dalam menjalankan amanah sesuai dengan standar yang berlaku dalam lembaga syariah. Sehingga pada akhirnya persepsi yang digunakan amil (akuntan) dalam pengambilan keputusan ataupun dalam standar penulisan akuntansinya tidak bertolak belakang dari peraturan yang telah ditetapkan.

BAZ tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Islam Indonesia atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(BAZNAS).[10] BAZNAS Gresik adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gresik dan sekitarnya, selain itu tujuan BAZNAS Gresik adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia dengan beberapa bantuan. BAZNAS Gresik merupakan salah satu badan amil zakat terbaik di Jawa Timur dalam transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan hasil pengumpulan dana zakat dan infak dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

HASIL PENGUMPULAN DANA ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH TAHUN 2010-2016

NO	TAHUN	PENGUMPULAN ZIS
1	2010	111.004.000,-
2	2011	353.482.800,-
3	2012	777.583.549,-
4	2013	1.980.412.882,-
5	2014	2.631.784.378,-
6	2015	3.993.396.689,-
7	2016	5.088.358.446,-

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban, 2016 oleh Badan Amil Zakat Gresik

[10] SK BAZNAZ Kabupaten Kota. dalam http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/II.3.%20SK%20BAZNAS%20kabupaten%20kota.pdf, diakses pada 13 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenaikan nilai dana zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional Gresik mengindikasikan bahwa adanya kesadaran serta kepercayaan pihak *muzakki* dalam menyalurkan dananya. Tentunya kesadaran serta kepercayaan itu terbentuk dari semakin baiknya sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Gresik. Selain itu, slogan amanah, profesional dan transparan yang melekat dalam BAZNAS Gresik mampu di implementasikan dalam sebuah kinerja yang baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul "Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Gresik Tahun 2015-2016)".

B. Identifikasi Masalah

1. Pengelolaan dan metode pendistribusian pendapatan dengan baik dapat meminimalisir kesenjangan sosial dan menekan angka kriminalitas.
2. Implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik.
3. Prinsip Akuntabilitas dalam implementasi konsistensi PSAK 109.

C. Batasan Masalah

1. Prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.
2. Kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik?
2. Bagaimana kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109?

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul "Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Gresik Tahun 2015-2016)".

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu serta penjelasannya yang dijadikan sebagai perbandingan dalam membuat penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Amin Rahmanurrasjid tentang "Akuntablitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik di daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007, terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban peerintah daerah untuk untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah menemui kendala karena tidak adanya evaluasi dari pemerintah atas penyampaian LPPD, penyampaian LKPJ tidak disertai dengan perhitungan APBD, pembahasan di DPRD yang cenderung bersifat politis dan sikap masyarakat yang apatis terdapat informasi LPPD yang disampaikan.[11]Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu, sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dan kontribusinya dalam terciptanya *Good Corporate Governance* dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan serta obyek penelitian. Penelitian sebelumya menggunakan pendekatan normatif dan empiris sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus. Obyek penelitian sebelumnya menggunakan obyek penelitian pada Pemda Kebumen sedangkan penelitian ini menggunakan obyek pada BAZ Gresik.

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yoserizal tentang Implementasi prinsip akuntabilitas publik dan kaitanya dengan reformasi birokrasi di sumatera barat. Dari penelitian Yoserizal dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respon dan kekuatan institusi. Selain itu, penelitian

[11] Amin Rahmanurrasjid, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah", (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Adapun persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang prinsip akuntabilitas dalam upaya membentuk *Good Corporate Governance*.dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan *grounded theory* sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dan penelitian sebelumnya meggunakan obyek penelitian pada Pemda Sumatera Barat sedangkan penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian pada BAZNAS Gresik.[12]

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja tentang "Analisis Implementasi PSAK 109 Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)", dari penelitian Agus Purwanto, Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmadja dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penyajian dan pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Kabupaten Buleleng hanya membuat laporan keadaan kas zakat, laporan keadaan kas infak/sedekah dan laporan keadaan kas operasional. Di dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa amil harus menyajikan 5 laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan,

[12] Yoserizal, "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat" (Skripsi—Universitas Andalas, Padang, 2011), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi PSAK 109. Perbedaannya terletak pada metode dan obyek penelitian. Penelitian sebelumya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif. Obyek penelitian sebelumnya pada BAZNAS Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian pada BAZ Gresik.[13]

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Astri Latifah tentang "Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Terhadap Akuntabilitas Pembukuan Pada BAZ Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)", dari penelitian Astri Latifah dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh di BAZ Kabupaten Tulungagung sesuai dengan SOP (Standar Operational Prosedur). Namun, dalam pencatatan transaksi yang terjadi di BAZ Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 hal ini terbukti dari hasil analisis PSAK Nomor 109 yang menunjukkan bahwa tidak adanya laporan perubahan dana.[14] Adapun persaman dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan implementasi PSAK 109, sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan obyek penelitian. Jika penelitian sebelumnya menggunakan

[13] Agus Purwanto, dkk. "Analisis Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)", *Jurnal AkuntansiProgram S1* , Vol.7 No.1 (2017), 10.

[14] Astri Latifah, "Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Terhadap Akuntabilitas Pembukuan Pada BAZ Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)", *Jurnal Akuntans*i (2013), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan obyek BAZ Tulungagung. Penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan obyek penelitian pada BAZ Gresik.

Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikamatuniayah Marliati tentang "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang", dari penelitian Nikmatuniayah Marliati dapat disimpulkan bahwa secara garis besar LAZ di Kota Semarang telah melakukan pelaporan laporan keuangan publik, namun secara standar PSAK 109, LAZ di Kota Semarang belum semuanya menerapkan. Permasalahan yang dihadapi LAZ di Kota Semarang adalah minimnya tingkat profesionalisme serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.[15] Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akuntabilitas dan penerapan PSAK109 yang terdapat di lembaga zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang dipilih, penelitian yang dilakukan Nikmatuniayah Marliati ini menggunakan pendekatan *multiple case study* dengan menggunakan lebih dari satu obyek penelitian sedangkan penelitia ini pendekatan studi kasus yang hanya terfokus pada satu obyek penelitian yaitu pada BAZNAS Gresik.

[15] Nikmatuniayah Marliati, *"Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang"*, Jurnal MIMBAR**,** Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik.
2. Mengetahui kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoretis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah keilmuan ekonomi terkait dengan *good corporate governance*, akuntansi syariah, manajemen zakat wakaf, serta sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
   b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.
2. Secara praktis
   a. Bagi peneliti

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menambah pengalaman serta pengetahuan tentang akuntansi zakat sesuai PSAK 109.
   b. Bagi para pengguna informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi para pemakai laporan keuangan dalam memahami penerapan PSAK 109 khususnya di BAZ Gresik.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi kepada masyarakat tentang Badan Amil Zakat Nasional Gresik dan segala hal yang terdapat didalamnya.

d. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Gresik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tolak ukur kinerja Badan Amil Zakat Nasional Gresik dalam penerapan dan kepatuhan kepada PSAK 109.

H. Definisi Operasional

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan melakukan evaluasi kerja, keterbukaan pembuatan keputusan, mengacu jadwal yang ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugasnya.[16]

2. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[17]

---

[16] Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan*..., 410.
[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia "Implementasi" dalam http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi/mirip, diakses pada 10 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. PSAK 109

PSAK 109 adalah sebuah pernyataan terkait standar akuntansi keuangan yang berfokus pada zakat dan infak/sedekah.

4. BAZNAS Gresik

BAZNAS Gresik adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan (penerimaan, pengelolaan, penyaluran) zakat dan infak/sedekah di kota gresik.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.[18]

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif, yaitu suatu langkah kerja untuk medeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting social* terejawantahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.[19] Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka.

[18]Mudjia Rahardjo, Thesis, *"Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya"*, ("Thesis"--, UIN Malik Ibrahim Malang, Program Pascasarjana, 2017)
[19] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dalam hal ini tujuan penelitan adalah mengenai "Prinsip Akuntablitas Dalam Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)".

2. Data dan Sumber data

a. Data

Data dapat diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.[20]

1) Data Primer

a) Dokumen BAZNAS Gresik

b) Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015-2016

2) Data Sekunder

a) Profil BAZNAS Gresik

b) Sejarah BAZNAS Gresik

c) Visi dan Misi BAZNAS Gresik

d) Program BAZNAS Gresik

b. Sumber Data

Menurut Lofland dalam sumber data utama adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan

[20] Muslihin al Hafizh, Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian. dalam http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 12 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain-lain.[21] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yakni subjek penelitian dijadikan sumber informasi penelitian untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya, dalam hal ini menggunakan istilah wawancara/*interview*.[22] Yang dirasa memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan masalah penelitian, dalam hal ini adalah pengelola BAZNAS Gresik.

2. Sumber Data Sekunder

   a) Dokumen, adalah kejadian masa lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.[23] Sedangkan dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan pembuktian suatu kejadian.[24] Dalam hal ini diperoleh melalui pihak BAZNAS Gresik melalui website dan majalah.

   b) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan

[21] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), 157.
[22] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian* Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 129.
[23] *Ibid*., 148.
[24] *Ibid*., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubunganya dengan penelitian ini.[25]

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[26] Perlunya pengamatan di BAZ Gresik sebagai obyek studi untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis.

2) Wawancara (*Interview*)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[27] Dalam hal ini peneliti melakukan komunikasi dengan pegawai BAZ Gresik untuk menggali dan memperoleh data serta informasi yang jelas dan lengkap.

3) Dokumentasi

[25] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 12.
[26] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 118.
[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitaif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah proses mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.[28] Dalam proses medapatkan data penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang tersedia di BAZNAS Gresik.

d. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[29] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti hanya membahas data seputar rumusan masalah saja.

2) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dari penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[30] Dalam memudahkan untuk menganalisis data, peneliti melakukan pengelompokan data dan menyusun data tersebut secara sistematis.

[28] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitia Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 149.
[29] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.
[30] *Ibid*., 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis semua data yang diperoleh dari penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.

e. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[31] Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode *Good Corporate Governance*. Mengukur sejauh mana perusahaan dalam hal ini adalah BAZNAS menggunakan prinsip akuntabilitas dalam implementasi konsistensi PSAK 109 sehingga tercapai tata kelola perusahaan yang baik.

Aplikasi dalam penelitian ini adalah mengungkapkan implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik, serta menganalisa kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat di BAZNAS Gresik yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti "Prinsip Akuntabilitas Dalam

[31] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif..., 248.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Gresik Tahun 2015-2016)".

J. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada.

BAB III HASIL PENELITIAN, merupakan uraian tentang data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai BAZNAS Gresik terkait latar belakang berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat di BAZNAS Gresik dan kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA, merupakan uraian implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat di BAZNAS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Sebuah usaha dikatakan baik,jika meletakkan skala keberlangsungan hidup jangka panjang (*sustainable*) diatas skala profit. Artinya usaha seperti ini sibuk mengatur sistem, baik internal ataupun eksternal dalam rangka menguatkan serta mencari identitas dengan harapan usaha yang dijalankan dapat berlangsung lama dan mensejahterakan dibanding hanya memburu profit tanpa memperhitungkan usia usaha. Tentunya sebuah usaha yang baik dalam artian mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama berawal dari tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Pengertian *Good Corporate Governance* sebelumnya telah banyak didefinisikan oleh berbagi ahli maupun organisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut *World Bank*, *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan berusahan dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.[1]

[1] Muhammad dan Lukaman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Citrawati menyatakan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.[2]

Johan Pieris dan Nizan Jim dalam etika bisnis dan *good corporate governance* memberi pendapat bahwa *good corporate governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku kepentingan(*stakeholder),* hukum dan aturan (*rule of law)*, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.[3]

Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), *corporate governance* didefiniskan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.[4]

Sedangkan menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

---

[2]Citrawati Fitri Kartika, *Good Environmental Governance*, (Malang: UB Press, 2012), 28.
[3]Johan Pieris dan Nizam Jim, *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*,(Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), 131.
[4]Muh. Arief Efendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.[5]

Sesuai pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.[6]

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan.

Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* telah menjadi paradigma baru, dengan menuntut unsur-unsur seperti: transparansi dalam kepengurusan, pertanggungjawaban, kewajaran dalam menjalankan aktivitas, dan tuntutan profesionalisme.[7]

---

[5]Ibid, 3.
[6]Renitha Ratu Hindistari dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, "Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana: 101-128*, Vol.16.1.(Juli, 2016), 9.
[7]Hessel Nogi S. Tagkilisan, Terj. *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana 2003), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah *Good Corporate Governance*

Konsep *Good Corporate Governance* pertama kali muncul pada tahun 1970-an setelah terungkapnya sejumlah skandal korporasi di Amerika Serikat ketika beberapa perusahaan diketahui terlibat dalam kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan dilanda budaya korupsi.[8] Pada waktu itu terjadi kegagalan pada perusahaan-perusahaan berskala besar (baik di sektor keuangan maupun bukan keuangan), serta skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara, banyak perusahaan (korporasi) memberi perhatian khusus pada pentingnya penataan tata kelola perusaan yang baik (*Good Corporate Governance).*

Penyebab terjadinya kegagalan *Good Corporate Governance* tersebut diantaranya adalah sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian terhadap pemegang saham minoritas. Karena hal-hal di atas, pada tahun 1990-an muncul tuntutan agar *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai organisasi seperti diantaranya: World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Organisasi-organisasi tersebut berkesimpulan bahwa prisnsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* seperti

[8]Ahmad Kurniawan, "Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dari Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara)", "Skripsi" – UIN Walisongo Semarang, 2014, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparancy, *accountability*, *fairness*, dan *stakeholder concern* dapat menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang mengalami krisis agar dapat bangkit ke arah yang yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola secara dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar dapat mempunyai daya saing yang tangguh untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadburry pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Cadburry Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadburry Comite* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, serta *stakeholder* internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing.[9]

Pada awalnya perkembangan *Governance* dikenal melalui berbagai aturan yang diterapkan oleh gereja. Dalam perkembangan berikutnya beralih pada isu-isu revolusi industri dan akhirnya bermuara pada kemunculan kapitalisme. Dominasi kapitalisme sangat kental mewarnai pola-pola *Governance* korporasi pada abad ke-19. Namun setelah itu mulai tumbuh serikat buruh yang mengimbangi dominasi para kapitalis karena mereka menekan tingkat upah sebagai

[9]Ova Kurniawan, *Project Assigment Reeport: Menigkatkan Implementasi Good Corporate Governance*, (Jakarta: PT PLN Persero), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari strategi memenangkan bisnis.[10] Sementara itu muncul pula perkembangan dari arah lain berupa konsumerisme yang tumbuh pada unit-unit bisnis. Persaingan perusahaan berkembang melalui peningkatan konsumen sebagai salah satu kelompok *stakeholder* yang sangat penting. Dinamika tersebut membawa pengaruh yang signifikan terhadap iklim dan situasi pengelolaan korporasi, berupa keharusan mengakomodasi semua tantangan yang ada dalam konsepsi *Good Corporate Governance.*

Pada tahun 1985, setelah terjadi kegagalan bisnis oleh perusahaan keuangan yang sangat terkenal yaitu *Savings and Loan*, terbentuklah Komisi *Treadway*.Tugas utama Komisi ini ialah mengidentifikasi sebab-sebab utama dari kesalahan interpretasi dari laporan keuangan dan memberikan rekomendasi untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahan tersebut. Tahun 1987, Komisi *Treadway* mengeluarkan laporan yang berisi rekomendasi perlunya suatu lingkungan pengawasan yang mencukupi seperti komite audit independen dan obyektif, perlunya kriteria untuk audit internal, perlunya laporan keuangan yang diumumkan secara publik, dan sebagainya.*Good Corporate Governance* diyakini sebagai kunci sukses

[10]Man An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang.[11]

Perusahaan sebagai sebuah sistem membutuhkan berbagai perangkat penting seperti struktur *Good Corporate Governance*, yang disertai dengan aturan main yang jelas *(definition of rules and powers serta code of conducts)* dalam bentuk mekanisme *governance* yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin terpeliharanya kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan.[12]

Di Indonesia konsep *Good Corporate Governance* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 *(Letter of Intent)* antara pemerintah Indonesia dengan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *economy recovery* pasca krisis, bermula dari adanya nota kesepakatan moneter. Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yakni Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKGC) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/08/1999 dan melahirkan pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama. Tugas pokok KNKGC adalah merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai *Good Corporate Governance*, serta memperakarsai dan memantau perbaikan di bidang *Corporate Governance* di Indonesia.

---

[11]Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonesia 2006), 4.
[12]Man An Abdullah, *Corporate Governance*..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2004 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Ekonomi Nomor: KEP-49/M.EKON/II/2004 untuk memperluas tugas KNKGC dan memperluas cakupan tugas sosisalisasi *governance* bukan hanya pada sektor korporasi tapi juga pada sektor pelayanan publik. Tahun 2006 KNKG menyempurnakan pedoman *Good Corporate Governance* di Indonesia. Selain pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh KNKG, sejumlah undang-undang juga menekankan penerapan *Good Corporate Governance.* Diantaranya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bab IV menyebutkan pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tidak hanya itu, bahkan terdapat pedoman praktik *Good Corporate Governance* pada lingkungan BUMN yang terbaru diatur dalam peraturan Menteri Negara BUMN No Per 01/MBU/2011 yang telah di sempurnakan pada tahun 2011.

Sedangkan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance.* Hanya saja lembaga pengelola zakat belum mempunyai pedoman tersendiri dalam mengimplementasikan *Good Corporate*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Governance. Walaupun demikian, dalam implementasinya lembaga pengelola zakat dapat mengadopsi pedoman *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Berkaitan dengan *Good Governance,* orientasi di sektor publik adalah untuk menciptakan *Good Governance,* dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Beberapa organisasi memberikan pernyataan yang menarik dan tentunya secara garis besar bermakna hampir sama tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* diantaranya:

United Nation Development Program (UNDP) karakteristik *Good Governance* adalah sebagai berikut[13]

a. *Participation.* Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
b. *Rule of law*. Penegakan hukum harus adil dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. *Transparancy* yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
d. *Responsiviness* (daya tanggap). Setiap lembaga publik harus responsif melayani kepentingan *stakeholder.*

[13]Hessel Nogi S. Tagkilisan, Terj. *Manajemen Publik*..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Consensus orientation* (musyarawarah mufakat). *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik dalam hal kebijakan prosedur.

f. *Equity*. Semua warga negara mempunyai kesempatan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses organisasi harus menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dengan mengoptimalkan simber daya yang ada.Efektif lebih berkaitan dengan tercapainya tujuan, sedangkan efisien lebih berkaitan dengan penghematan waktu.

h. *Accountability*. Pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, masyarakat, bertanggungjawab kepada semua *stakeholder.*

Sedangkan dalam konsep *Good Corporate Governance,*setiap organisasi/perusahaan harus memastikan bahwa setiap asas GCG diterapkan pada setiap aspek organisasi.Prinsip mempunyai arti yang sama dengan kata asas, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuanberpikir atau berpendapat.[14] Menurut KNKG asas *Good Corporate Governance* tersebut adalah transparansi, akutabilitas,

[14]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk kesinambungan organisasi dengan memperhatikan pemangku kepentingan *(stakeholder)*.[15]Penjabaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang disusun KNKG adalah sebagai berikut:

a. Transparansi, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan.
b. Akuntabilitas, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga organsasi berjalan dengan efektif.
c. Responsibilitas, lembaga organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sehingga terjaga kesinambungan lembaga.
d. Independensi, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[15]Komite Nasional Kebijakan Goverance, *Pedoman Good Corporate Governace Indonesia*, (Jakarta: KNKG 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perilaku adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.[16]

4. *GoodCorporate Governance*Menurut Islam

a. Prinsip Pengungkapan (transparansi)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...[17] (Q.S. Al Baqarah : 282)

Ayat tersebut merupakan sub bab tentang kesaksian dalam muamalah dan menekankan tentang pentingnya pengungkapan (transparansi) yang menjadi pondasi dalam kegiatan muamalah baik individu, kelompok, korporasi maupun badan usaha.

b. Prinsip Akuntabilitas

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[18] (Q.S. Al Anfaal:27)

---

[16]Ova Kurniawan, *Project Assigment Reeport*..., 12.
[17]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 88.
[18]Ibid, 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas termasuk dalam kategori larangan berkhianat dan faidah bertakwa. Dari sini dapat dilihat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan anjuran yang telah ditetapkan dalam kehidupan.

Islam memandang akuntabilitas tidak terbatas pada kehidupan individu semata namun juga berlaku untuk sebuah badan usaha ataupun perusahaan. Selain itu, orientasi akuntabilitas dalam islam tak hanya di dunia saja, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan setelah di dunia, yaitu: akherat.

5. Akuntabilitas

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, Akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action.* Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk.[19] Ide dasar akuntabilitas adalah kemampun seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan pertanggungjawaban pada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada

[19]Komite Nasional Kebijakan Goverance, *Pedoman Good Corporate Governace Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.[20]

Sedangkan menurut Keputusan Menteri BUMN nomor 117/2002, menyebutkan, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga organisasi berjalan dengan efektif.[21]

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang utama dalam tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media secara periodik.[22] Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi baik secara langsung berupa lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas kinerja semua organ suatu organisasi kepada semua pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas

[20]LAN dan BPKP, *Modul Akuntabilitas dan Good Governance* edisi 1, (Jakarta: Lembaga Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan, 2000), 21.
[21]Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, Pasal 3 ayat c.
[22]LAN dan BPKP, *Modul Akuntabilitas*..., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalannya organisasi tersebut. Seperti yang dikutip daeri BPKP, Akuntabilitas terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

a. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah pengungkapan laporan keuangan yang disajikan mencakup peneriamaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana.

b. Akuntabilitas prosedur

Akuntabilitas prosedur merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah prosedur mengenai penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah menetapkan moral, etika dan kepastian hukum untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat (efektifitas) pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Efektifitas harus dicapai bukan hanya berupa *output* tetapi juga yang penting adalah efektifitas dari sudut pandang *outcome.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mardiasmo mengemukakan bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur dari aspek akuntabilitas yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut:[23]

a. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
d. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik;
e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dalam konsep Akuntabilitas ketika individu atau organisasi menerima wewenang dari/atau delegasi tanggungjawab, mereka harus menyususun rencana, melaksanankan rencana, dan mengukur serta melaporkan hasil yang nyata dibandingkan dengan rencana yang telah disusun. Penerimaan laporan ini akan menghasilkan umpan balik, rencana baru untuk pengembangan berikutnya, dan siklus baru.

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh

[23]Hesel Nogi S. Tangkilsan, *Manajemen Publik*..., 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggungjawab pada soal pemegang saham menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara mereka atau dengan cara lain. Campur tangan dalam manajemen perseroan yang melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan, serta pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga mempunyai tanggungjawab yang serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan secara independen, khususnya terhadap manajemen.

Perusahaan seharusnya mendefinisikan fungsi, hak, tanggungjawab, dan kewajiban masing-masing organ perusahaan serta mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada setiap pihak yang berkepentingan. Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan seharusnya jelas aspek akuntabilitasnya. Perusahaan senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Arief efendi dalam *the power of good corporate governance* mengemukakan tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:[24]

a. Akuntabilitas individual

   Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapat penugasan dari pemegang wewenang.

b. Akuntabilitas tim

   Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitasyang ditanggung bersama oleh suatu kelompok atas kondisi kinerja yang tercapai.

c. Akuntabilitas korporasi

   Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

[24]Arief Efendi, *The Power Of Good Corporate* Governance..., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. PSAK 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:[25]

1. Pengakuan dan Pengukuran
   a. Penerima Zakat
      1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
      2) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
         a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
         b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
         c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

[25]Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft PSAK No. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. ujrah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
4) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
5) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
   a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
   b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b. Penyaluran Zakat
   1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
      a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
      b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
   2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan dalam bentuk kebijakan amil.
4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
   a) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

b) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

(1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

(2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendaliakn amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3. Pengungkapan

a. Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

   b) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.

   c) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

   d) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas.

   e) Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik.

   f) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

   g) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:

      (1) Sifat hubungan.

      (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

      (3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

b. Infak/Sedekah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
2) Kebijakan penyaluaran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
6) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
7) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
   a) Sifat hubungan.
   b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS GRESIK TAHUN 2015-2016)

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Gresik

1. Profil

Pendirian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Gresik bermula dari usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZNAS Gresik itu sendiri menurut Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah BAZ Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Gresik, namun mengalami kefakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (BAZ) Periode 2008-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awalnya, BAZ ini berkantor di ruang kesekretariatan Kasi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada Kantor DEPAG Kabupaten Gresik, kemudian sejak bulan Juni 2010 lalu bersamaan dengan menyongsong Ramadhan 1431 H, BAZ Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor sekretariat barunya yang masih satu atap dengan masjid Pemda Kab. Gresik yakni bertempat di Masjid Al-Inabah di lingkungan kantor Pemda Gresik Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Telp. (031) 3952825-30 Gresik 61161, namun mulai tahun 2015 sampai sekarang kantor sekretariat BAZNAS Gresik pindah ke gedung baru yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik atas usulan Wakil Bupati Gresik selaku ketua umum BAZNAS Gresik.[1]

Dengan keberadaan kantor/gedung baru tersebut BAZNAS Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan yang maksimal baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*. Disamping itu, BAZNAS Gresik juga menerbitkan Bulletin atau majalah yang dinamakan *Tazkiyah* sebagai media informasi dan silaturrahim kepada para muzakki/donatur. Majalah tersebut diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara *muzakki* dengan pengelola, pengelola dengan *mustahiq* maupun *muzakki* dengan *mustahiq* secara langsung dalam pengembangan wawasan dan informasi tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat yang ada di Kabupaten Gresik.[2]

---

[1]Muhtadin,*Wawancara*, Gresik, 21 Agustus 2017.
[2]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZNAS Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZNAS Gresik ini diharapkan bisa membantu meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.

Dasar Hukum Berdirinya BAZNAS Kabupaten Gresik[3]

a. UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
b. PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
d. SK Bupati Gresik No. 451 / 1131 / HK / 437.12 / 2015 Tentang Perpanjangan SK pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Gresik.

2. Visi, Misi, Nilai, & Azas Pengelolaan BAZ Gresik[4]

Setiap organisasi atau perusahaan mana pun pasti memiliki tujuan serta visi dan misi, sehingga dengan tujuan, visi dan misi yang dimiliki, maka perkembangan dapat terarah. Begitu juga dengan Badan Amil Zakat Gresik, mempunyai tujuan dalam menentukan arah dan perkembangan Badan Amil Zakat Gresik itu sendiri.

[3]Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gresik Tahun 2016, 2.
[4]Dokumen Profil BAZ, Gresik, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada pun yang menjadi tujuannya, yaitu:

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Gresik dan sekitarnya.
b. Memberdayakan dan mengembangkan sdm dengan beberapa bantuan.

Kemudian yang menjadi visi dan misi dari Badan Amil Zaka Gresik ini adalah, visi "Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang bertaqwa, Cerdas dan Berdaya".

Sedangkan misinya adalah :

1) Mewujudkan organisasi BAZNAS yang transparan, amanah dan profesional.
2) Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
3) Memadukan potensi jaringan antar BAZNAS / LAZ untuk menjadi kakuatan menyatukan strategi pemberdayaan melalui pengelolaan.
4) Melakukan upaya pengembangan SDM dalam bidang pengelolaan BAZNAS.

Sebagai entitas umat yang bertanggungjawab penuh kepada Allah dan umat, BAZNAS Gresik tidak sampai di antara visi dan misi saja. lebih dari itu terdapat nilai yang terkandung di dalam arah gerak diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Taqwa

Semua hal yang dilakukan amil adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan akan mempertanggungjawabkan kepada-Nya.

2) Shiddiq

Menjalankan tugas secara bertanggungjawab sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas dan diakui.

3) Tabligh

Membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan pungutan ZIS.

4) Amanah

Prinsip utama pengelolaan ZIS adalah kejujuran dan integritas.

5) Fathanah

Mengembangkan pengelolaan ZIS yang memadukan pelaksanaan syariah dalam kekinian sistem, manajemen, teknologi, dan budaya kerja.

Dalam pengelolaannya pun Badan Amil Zakat Nasional Gresik mempunyai acuan dan menjadi motto yang konsisten di terapkan diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Amanah

Pengelolaan dana ZIS (pengumpulan, pengadministrasian dan pendistribusian) dilakukan sesuai tuntunan syar'i, dilandasi niat, ikhtiar dan sesuai dengan undang-undang. Serta memiliki integritas, jujur, adil, bertanggungjawab dan mampu mengembangkan kepercayaan serta selalu sadar bahwa Allah SWT selalu melihat setiap pekerjaan, perbuatan, dan segala sesuatu yang terlintas dihati.

2) Profesional

Pengelolaan dana ZIS dilakukan secara profesional sesuai sistem manajemen pengelolaan keuangan. Dilandasi kompetensi, pengetahuan dan komitmen serta memahami cara mengimplementasikan, disiplin, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi.

3) Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan ZIS bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Hal ini bedasar dengan adanya layanan website BAZNAS Gresik serta bulletin yang disebarkan setiap tahun nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi

Tabel 3.1

Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik

Periode 2011 - 2016[5]

No	Jabatan	Nama
1.	Dewan Pertimbangan	a. Bupati Gresik b. Ketua DPRD Kab. Gresik c. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Gresik d. Drs. KH. A. Fathoni Abdusy Syukur e. KH. Munawar Kholil
2.	Komite Pengawas	a. KH. Agus Nur Muhammad b. KH. Mukhtar Jamil c. Dr. Abd. Kholiq d. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag e. Hary Soerjono, SE. MM
3.	Badan Pelaksana	a. Ketua Umum : Wakil Bupati Gresik b. Ketua I : Sekretaris Daerah kabupaten Gresik

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		c. Ketua II : Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupatem Gresik d. Ketua III : Drs. KH. Moh. As'ad Thoha, M.Ag e. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik f. Sekretaris I :Kasi Penyelenggara Zakat Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kabupatem Gresik g. Sekretaris II : Nasichun Amin, M.Ag h. Bendahara : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik i. Wakil Bendahara : Kasubbag Keagamaan Kependidikan dan Kebudayaan Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
4.	Seksi seksi	1. Pengumpulan Koordinator : Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Anggota : a. Nadjib, S.Ag b. Zainal Abidin, S.Ag c. Sa'at, S.Pt d. Muhtadin, S.H.I e. Kasi Keagamaan PT. Petrokimia Gresik 2. Seksi Pendistribusian Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik. Anggota : a. Drs. H. Hamdun b. Syifa'ul Qulub, M.Ag c. Samsul Huda, S.Ag d. Ahmad Willy Santoso, S.Sos.I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		3. Seksi Pengembangan Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik. Anggota : a. Drs. H. Mansoer Shodiq, M.Ag b. Drs. H. Abdul Basith Fauzan, M.Ag c. Imam Hanafi, M.Ag d. H. Zakariya Anshori e. Koordinator LAZIS PT. Semen Gresik

Dengan berlakunya kepengurusan yang baru ini, maka keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/437.13/2009 yang diumumkan dalam Berita Daerah Nomor 620 tanggal 20 Oktober 2009 tentang perubahan atas keputusan Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 Badan Amil Zakat (BAZ) Periode 2008-2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Adapun BAZ yang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut diatas masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dewan Pertimbangan

   Memberikan bimbingan pertimbangan guna saran dan pendapat dalam kebijaksanaan pengumpulan serta pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak.

2. Komisi Pengawas

   Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas administrative dan pengawasan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

3. Badan Pelaksana

   a. Menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama serta tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Menyelenggarakan tugas penelitian, pendayagunaan, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.

   c. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Dewan Pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Program Pendistribusian

a. Gresik Cerdas : berupa beasiswa tingkat SD, SMP, SMA, beasiswa siswa SMKN dan Mahasiswa produktif, insentif guru ABK/Inklusi non PNS, insentif RC dan biaya pendidikan

Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :[6]

Tabel 3.2

Pendistribusian Gresik CerdasTahun 2015

Program	Jumlah
Beasiswa tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMU/SMK	420 siswa
Biaya pendidikan	10 siswa
Siswa ABK	1 siswa
Mahasiswa produktif	25 mahasiswa
SMK produktif	20 siswa
Total Pendistribusian	Rp. 332.632.900,-

Tabel 3.3

Pendistribusian Gresik Cerdas Tahun 2016

Program	Jumlah
Beasiswa tingkat MI/SMP/MTs/SMU/SMK	451 siswa

[6]Dokumen BAZ Gresik, 2015-2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya pendidikan	278 siswa
Paket sekolah	1456 siswa
Mahasiswa produktif	49 mahasiswa
SMK produktif	40 siswa
Total Pendistribusian	Rp. 650.082.760,-

b. Gresik Sehat : berupa kegiatan pengobatan gratis, bantuan kacamata, perbaikan gizi, ibu hamil dan menyusui, serta biaya berobat bagi dhuafa'.

Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :[7]

Tabel 3.4

Pendistribusian Gresik Sehat Tahun 2015

Program	Jumlah	Lokasi
Pengobatan Gratis	12 kali	Desa Delegan Panceng, PP Nurul Qur'an Bungah, Dusun Tempel Cerme, Sangkapura dan Tambak (Pulau Bawean)
Biaya pengobatan	6 orang	
Total Pendistribusian		Rp. 129.656.625,-

[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Pendistribusian Gresik Sehat Tahun 2016

Program	Jumah	Lokasi
Pengobatan Gratis	15 kali	Wahana Ekspresi Wringinanom, Betoyo kauman Manyar, Balai desa Wringinanom, Kawisto Windhu Duduksampeyan, SMAN 1 Balongpanggang, SMPN 1 Cerme, Masjid Agung Gresik, Madumulyo Dukun, Sangkapura dan Tambak (Pulau Bawean)
Bantuan Kaca mata	37 buah	
Layanan cek kesehatan	6 kali	Masjid Baiturrahman Driyorejo, Masjid Kanjengsepuh, Masjid Miftah Huda, Masjid Desa Banter, Masjid Miftahul Huda Driyorejo
Bantuan Ibu	30	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyusui	orang	
Bantuan berobat	41 orang	
Total Pendistribusian		Rp. 168.382.710,-

c. Gresik Berdaya : berupa bantuan ternak dan modal bergulir, serta bantuan alat kerja.Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :[8]

Tabel 3.6

Pendistribusian Gresik Berdaya Tahun 2015

Program	Jumlah
Modal bergulir tanpa bunga	28 orang
Alat kerja	3 orang
Ternak bergulir	126 orang
Total Pendistribusian	Rp. 802.918.000,-

Tabel 3.7

Pendistribusian Dana Gresik Berdaya Tahun 2016

Program	Jumlah
Modal bergulir tanpa bunga	8 orang/kelompok
Alat kerja	1 orang
Ternak bergulir	12 orang/kolektif

[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kandang	3 kolektif
Total Pendistribusian	Rp. 218.467.200,-

d. Gresik Peduli : berupa bantuan fakir seumur hidup, perbaikan rumah tidak layak huni, santunan yatim & dhuafa', dan bantuan bencana alam.Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :[9]

Tabel 3.8

Pendistribusian Dana Gresik Peduli Tahun 2015

Program	Jumlah
Santunan yatim dan dhuafa	1360 orang
Buka puasa bersama	1099 orang
Bantuan fakir	4 orang
Bantuan gizi buruk/ibu menyusui	60 orang
Ibnu sabil	37 orang
Bedah rumah	13 rumah
Total pendistribusian	Rp. 1.018.222.550,-

Tabel 3.9

Pendistribusian Dana Gresik Peduli Tahun 2016

[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program	Jumlah
Santunan yatim	2002 orang
Santunan dhuafa	3680 orang
Buka puasa bersama	1000 orang
Ibnu Sabil	33 orang
Bedah rumah	12 rumah
Total Pendistribusian	Rp. 1.019.150.600,-

e. Gresik Taqwa : berupa bantuan pembangunan masjid/musholla, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan untuk fisabilillah, donasi pesantren, dan bantuan insentif Khafidz/ah serta guru TPQ/MADIN.\ Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :[10]

Tabel 3.10

Pendistribusian Dana Gresik Taqwa Tahun 2015

Program	Jumlah
Insentif pengeloala RC (Resources Centre)	12 orang
Bantuan agama	19 lembaga
Bantuan sarana ibadah	24 lembaga
Penerbitan majalah	1 kali terbit
Total Pendistribusian	Rp. 563.718.8222,-

[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.11

Pendistribusian Dana Gresik Taqwa Tahun 2016

Program	Jumlah
Insentif pengelola RC (Resources Centre)	14 orang
Bantuan agama	58 lembaga
Bantuan sarana ibadah	22 lembaga
Penerbitan majalah	2 kali terbit
Total Pendistribusian	Rp. 1.051.336.570

B. *Good Corporate Governance*

1. Ketentuan *Good Corporate Governance*

Ketentuan/pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang untuk selanjutnya disebut pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG. Prinsip dasarnya,perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting dalam kaitan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, karena dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip tersebut mengandung tanggungjawab serta transparansi perusahaan kepada semua pihak.[11]

Dalam rangka menjadi badan amil yang berpedoman pada Good Corporate Governance, BAZNAS Gresik mempunyai pedoman dalam hal akuntabilitas, yaitu :[12]

1. Pengumpulan
   a. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan
   b. Menerbitkan majalah tiap tahun
   c. Menyertakan kwitansi dalam setiap dana yang diperoleh kepada muzaki
   d. Muzaki Card Plus
   e. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan dana
2. Pendistribusian
   a. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian dana
   b. Transparansi

2. Kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109

Pada dasarnya, amil zakat yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain merupakan sebuah keharusan. Kontribusi akuntabilitas dalam penerapan PSAK 109 menjadi sebuah hal yang sangat penting. Terkait dengan akuntabilitas, BAZNAS Gresik sudah

[11]Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan prinsip ini dengan baik. Hal senada disampaikan oleh Devi, M.EI selaku bagian perencanaan keuangan BAZNAS Gresik

"Bahwa kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya".[13]

Tentunya pernyataan tersebut didukung dengan beberapa hal diantaraya :

a. Tersedianya laporan keuangan bulanan dan tahunan yang terlampir di website BAZNAS Gresik dan juga majalah.
b. Meningkatnya jumlah dana zakat yang diterima BAZNAS Gresik tiap tahunnya.
c. Pertumbuhan tingkat kepercayaan muzakki dari tahun ke tahun.

C. Implementasi PSAK 109

1. Ketentuan PSAK 109

Sesuai ED PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2008 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, suatu lembaga haruslah melakukan operasional kerja sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut terbagi menjadi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

[13]Devi, perencana keuangan, *wawancara*, Gresik 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZ Gresik sebagai lembaga zakat yang mulai beroperasi sejak tahun 2010 perlahan mulai melakukan pembenahan dalam segi penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

"Selama ini saya rasa belum sepenuhnya sesuai dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berstandar PSAK 109, karena ini masih baru, oleh karena itu masih perlu belajar dan berbenah".[14]

2. Implementasi PSAK 109

Dalam mengupayakan terselenggaranya lembaga/badan yang profesional dan transparan, pimpinan BAZ Gresik memulai dengan membekali seluruh elemen yang ada di *internal* untuk patuh dan taat dalam pelaksanaan operasional kerja sesuai dengan PSAK yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian perencanaan keuangan Badan Amil Zakat Gresik

"Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 adalah sebuah kebutuhan, kewajiban serta tuntutan yang harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat Gresik".[15]

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan karena memang perlu dan butuh untuk dilakukan, dalam hal ini BAZ Gresik sebagai

[14]Devi dkk, *wawancara*, Gresik, 21 Agustus 2017.

[15]Devi, perencana keuangan,*wawancara*, Gresik, 21 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

entitas nirlaba yang bertanggungjawab kepada Allah dan umat merasa butuh untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan agama agar senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dalam hidup. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai entitas umat BAZNAS Gresik berkewajiban menjalankan peraturan yang sudah disepakati tentang penyajian laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK 109. Sedangkan tuntutan berarti operasional BAZ atau lembaga pengelola zakat sudah diatur dalam Undang-undang sebagai payung hukum dan dituntut untuk mengikuti dan menjalankan.

Secara mekanisme kerja, Badan Amil Zakat Nasiona; Gresik menggunakan sebuah metode yang terpusat dari Badan Amil Zakat Nasional yang bernama SIMBA. SIMBA adalah sistem informasi manajemen baznas berupa aplikasi pengelolaan zakat yang berbasis web.[16] Semua transaksi mulai dari pengumpulan, pendistribusian, sampai laporan donasi dan laporan keuangan terdapat di dalamnya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja amil Nasional agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka Badan Amil Zakat Nasional Gresik membuat beberapa langkah diantaranya :

a. Melakukan pendampingan, dalam hal ini BAZNAS Gresik merangkul praktisi yang berpengalaman agar penyajian laporan akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[16] Devi, perencana keuangan, *wawancara*, Gresik 6 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan studi banding dengan BAZNAS di daerah lain untuk bertukar ilmu dan hal-hal lain yang belum ada di dalam *internal* BAZNAS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM IMPLEMENTASI PSAK 109

A. Analisis prinsip akuntabilitas dalam implementasi psak 109 di BAZNAS Gresik.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gresik untuk menjadi sebuah Badan Amil yang amanah, profesional dan transparan di Jawa Timur bahkan Indonesia tidaklah mudah. Berbagai upaya dilakukan yaitu dengan menitik beratkan pada sisi akuntabilitas dan kesesuaian dalam penyampaian laporan keuangan. Perbaikan demi perbaikan pun dilakukan mulai dari studi banding ke BAZ lain sampai dengan pendampingan oleh praktisi akuntansi guna terselenggaranya penyampaian laporan keuangan yang sesuai standar. Karena di era digital seperti saat ini, kecepatan akses dan keterbukaan informasi menjadi kebutuhan bagi semua pihak tak terkecuali *muzaki*.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yang memiliki definisi pertanggungjawaban atas kinerja semua organ suatu organisasi kepada semua pihak yang mempunyai hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepentingan atas jalannya organisasi tersebut. Dalam kaitannya dengan kinerja BAZNAS Gresik, akuntabilitas BAZNAS Gresik dibagi menjadi dua poin, yaitu :

1. Pengumpulan
    a. Membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan, dana yang masuk ke dalam BAZNAS Gresik akan diolah melalui sistem/alat yang bernama SIMBA (Sistem Manajemen BAZNAS). Input data akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan, pertama zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, kedua zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, ketiga zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Pengukuran, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyajian, amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisahdalam neraca

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kaporan posisi keuangan). Pengungkapan, amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Tujuan dari SIMBA adalah untuk mempermudah admin dalam mengolah dana pengumpulan dan pendistribusian.

b. Menerbitkan majalah tiap tahun, yaitu majalah *tazkiyah* berisi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tahunan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Gresik.

c. Menyertakan kwitansi dalam setiap dana yang diperoleh kepada muzaki, diminta atau tidak kewajiban amil BAZNAS Gresik adalah memberikan bukti setor dana ZIS kepada muzaki.

d. Muzaki Card Plus, yaitu sebuah kartu berkode sebagai identifikasi database penyetor zakat. Muzaki Card Plus merupakan fasilitas yang diberikan kepada muzaki yang terdaftar secara definitif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik. Kartu tersebut terdapat Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang dapat digunakan untuk akses secara online di aplikasi Muzaki Corner maupun aplikasi smartphone. Fasilitas dan fitur yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakses adalah laporan penyetoran ZIS secara *realtime* dan *up to date* bagi seluruh muzaki kapanpun dan dimanapun. Secara *realtime* dan berkala para muzaki akan mendapatkan pemberitahuan sesaat setelah menyetorkan dana ZIS di BAZNAS GRESIK melalui No. Telp/Handphone dan *Email* yang telah terdaftar di BAZNAS Gresik.

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan dana, pertama petugas melayani muzaki, munfiq dan mushodiq dengan pelayanan yang ramah sesuai budaya 3S (senyum, salam dan sapa). Setelah itu petugas menghitung, mengentri di aplikasi SIMBA dan mencatat dana ZIS, selanjutnya mencetak dan menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada muzaki, munfiq dan mushodiq serta BAZNAS Gresik sebagai bukti penerimaan kantor. Sebelum donatur meninggalkan kantor, petugas mendoakan dengan redaksi doa yang telah tertera.

2. Pendistribusian

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian dana, diawali dengan budaya 3S (senyum, salam dan sapa), lalu petugas, melakukan verifikasi berkas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajuan, memberikan tanda terima pengajuan. Setelah itu bagian pendistribusian memberi lembar disposisi dan disampaikan oleh kepala kantor maksimal 2 hari setelah pengajuan diterima. Selanjutnya kepala kantor/pengurus melakukan rapat terkait jumlah dana yang akan dicairkan. Bagian pendistribusian memberikan hasil disposisi dari kepala kantor ke bagian keuangan untuk dicairkan. Terakhir petugas memberi konfrmasi pengajuan paling lambat 2 minggu setelah pengajuan.

b. Transparansi, yaitu berupa keterbukaan dana yang di distribusikan melalui website BAZNAS Gresik, majalah *tazkiyah*, muzaki corner yaitu aplikasi yang disediakan BAZNAS Gresik kepada muzaki untuk dapat memantau dana yang sudah disetorkan sudah masuk atau belum, *whats app* muzaki yaitu grup *whats app* antara BAZNAS dan muzaki untuk berbagi informasi terkait dana yang sudah distorkan maupun didistribusikan.

Apabila diperhatikan penerapan akuntabilitas dalam kerangka kerja BAZNAS Gresik sesuai dengan pedoman GCG di Indonesia diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
b. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
c. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari pedoman GCG tersebut apabila kita afiliasikan dengan praktek kerja BAZ Gresik, maka akan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, akan terpenuhi apabila seluruh organ perusahaan mampu melaksanakan semua kewajiban yang telah diberikan. Tentunya hal tersebut dapat terselenggara dengan peraturan dan visi misi BAZNAS Gresik yang mengarah ke *good corporate governance*. Akuntabilitas kerja BAZNAS Gresik dapat dilihat dari sisi pengumpulan dana ZIS dan pendistribusian dana ZIS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tanggung jawab sosial sebagai badan amil zakat yang beroperasi di daerah Gresik, sejauh ini sudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional dan transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya nilai dana zakat dari tahun ke tahun. Tentunya hal tersebut mengindikasikan kepercayaan muzaki dalam menyisihkan dananya ke BAZNAS Gresik. Kepercayaan tersebut terbentuk dari adanya penyampaian laporan keuangan yang sudah dapat dilihat oleh semua pihak dan tentunya sudah sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Sebagai badan amil zakat yang beroperasi di daerah Gresik, untuk cakupan nasional dan internasional mungkin terlalu dini untuk disebutkan mengingat adanya BAZNAS pusat yang memiliki cakupan lebih luas. Namun untuk Kabupaten Gresik sendiri, BAZNAS Gresik dirasa cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan tersedianya zakat produktif berupa bantuan dana untuk usaha mikro yang tersebar di daerah Gresik, selain itu bantuan beasiswa sekolah mampu untuk menghidupkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimpi mereka dalam meraih kesuksesan namun dibatasi oleh biaya.

B. Kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi psak 109 di BAZNAS Gresik.

Mengupayakan untuk senantiasa berbuat kebaikan dari hari ke hari membuat sebuah badan amil zakat berproses menuju ke arah yang lebih baik. Kesadaran karyawan ditopang dengan peraturan kerja serta visi misi perusahaan menghasilkan lingkungan kerja yang baik. Dampak dari terselenggaranya lingkungan kerja yang baik adalah amanah, profesional dan transparan yang merupakan faktor dari prinsip akuntabilitas. Adapun kontribusi dari prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dalam pemanfaatan waktu dan disiplin kerja amil di BAZNAS Gresik, dengan adanya Sistem Manajeman BAZNAS (SIMBA), amil akan dapat meminimalisir kerja yang dilakukan. Hal ini terjadi karena SIMBA adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memudahkan amil dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Setiap muzaki akan mendapatkan nomor/kode yang selanjutnya akan di *input* kedalam SIMBA. *Output* dari hasil input data tersebut berupa laporan keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbaikan pengetahuan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, proses menuju BAZNAS yang berpedoman pada Good Corporate Governance, BAZNAS Gresik merangkul praktisi akuntansi yang berperan dalam *monitoring* laporan keuangan. Oleh karena itu, kontribusi prinsip akuntabilitas sangat besar dalam perbaikan pengetahuan amil dalam penyampaian laporan keuangan.
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Gresik, dampak dari penyajian laporan keuangan yang sudah sesuai ke website atau media sosial adalah masyarakat dapat mengakses kinerja BAZNAS Gresik tanpa terbatas waktu dan ruang. Dari kesesuaian kinerja tersebut membuat masyarakat tidak ragu dalam menyalurkan dana nya ke BAZNAS Gresik.

Menurut analisa penulis bahwa prinsip akuntabilitas yang diterapkan dan kontribusi yang didapatkan oleh BAZNAS Gresik dapat mewakili ciri-ciri perusahaan yang *accountable* diantaranya :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kerja secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara profesional
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan perusahaan
5. Adanya sasaran public unntuk menilai kinerja (performance) perusahaan. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas BAZNAS Gresik sebagai Badan Amil Zakat dituangkan dalam mekanisme kerja yang berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menitik beratkan pada kualitas pelayanan dan transparansi. Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga baik berupa pengumpulan atau pendistribusian, BAZNAS Gresik selalu memberikan kwitansi. Perbedaannya jika dalam pengumpulan ketika individu menyalurkan dananya akan diberi rekap hingga satu tahun, namun iika lembaga tidak akan diberikan rekapan hingga satu tahun penuh, hanya saat penyaluran saat itu saja. Dalam segi penerapan PSAK 109, BAZNAS Gresik menerapkan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang terpusat di BAZNAS.
2. Kontribusi prinsip akuntabilitas dalam implementasi PSAK 109 di BAZNAS Gresik diantaranya : (a) Perbaikan dalam pemanfaatan waktu dan disiplin kerja amil di BAZNAS Gresik, (b) Perbaikan pengetahuan dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan, (c) Peningkatan kepercayaan masyarakat dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Perlu kiranya pengelolaan website lebih baik lagi dan selalu menyajikan hal-hal terbaru agar supaya masyarakat tahu apa saja kegiatan BAZNAS Gresik, program kerja, pelatihan, dll yang tentunya berguna untuk perbaikan BAZNAS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwanto, dkk. 2017. *Analisis Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Non Profit Berbasis Religius (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Akuntansi Program S1, Vol.7 No.1.

Ahmad Kurniawan. 2014. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Jepara)*. "Skripsi" – UIN Walisongo Semarang.

Amin Rahmanurrasjid. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Tesis — Universitas Diponegoro Semarang.

Arif Maslah. 2012. *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)*. "Skripsi"—Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Astri Latifah. 2013. *Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Terhadap Akuntabilitas Pembukuan Pada BAZ Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di BAZ Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Akuntansi.

Burhan Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Citrawati Fitri Kartika. 2012. *Good Environmental Governance*, Malang: UB Press.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993),

Devi, perencana keuangan, *wawancara*, Gresik 21 Agustus 2017.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian* Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Djoko Muljono. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Andi.

Dokumen Profil BAZ, Gresik, 2016.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2016. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya.

Faris Abdurrahman. 2013. *Studi Evaluasi Akuntansi Zakat pada LAZIS dengan Pedoman PSAK 109*. Skripsi—Universitas Trisakti.

Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Hessel Nogi S. Tagkilisan. 2003. Terj. *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft PSAK No. 109*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Jessica Ayu Meirna Sitepu. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bulan Terang Utama*. Agora, Vol. 4, No. 1.

Johan Pieris dan Nizam Jim. 2007. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Jakarta: Pelangi Cendikia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia "Implementasi" dalam http://kamusbahasaindonesia.org/konsistensi, diakses pada 10 Juni 2017.

Keputusan Menteri BUMN Nomor 117 Tahun 2002, Pasal 3 ayat c.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: KNKG.

LAN dan BPKP. 2000. *Modul Akuntabilitas dan Good Governance* edisi 1, Jakarta: Lembaga Adminidtrasi Negara dan Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan.

Laporan Pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Kab. Gresik Tahun 2016.

Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

Man An Abdullah. 2010. *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mardalis. 1995 *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarrta: Bumi Aksara.

Mas Achmad Daniri. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia.

Muh. Arief Efendi. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad dan Lukaman Fauroni. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.

Mudjia Rahardjo. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya.* "Thesis"--, UIN Malik Ibrahim Malang, Program Pascasarjana.

Muslihin al Hafizh, Pengertian Data dan Fakta dalam Penelitian. dalam http://referensi_makalah.com/2012/08/pengertian-data-dan-fakta-dalam.html, diakses pada 12 April 2017.

Muhtadin, *Wawancara*, Gresik, 21 Agustus 2017.

Nikmatuniayah Marliati. 2015. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang*, Jurnal MIMBAR**,** Vol. 31, No. 2 Desember.

Nor Ipansyah, Nispan Rahmi, Rahman Helmi. 2013. "Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin", *Jurnal Tashwir*, Vol. 1 No.1 Januari-Juni.

Ova Kurniawan. 2012. *Project Assigment Reeport: Menigkatkan Implementasi Good Corporate Governance*, Jakarta: PT PLN Persero.

Pujianto. 2015. Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Studi Empiris pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah Di Kota Semarang", (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Jurusan Akuntansi).

Renitha Ratu Hindistari dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2012. *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1. Juli.

Rozalinda. 2013. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplkasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedarmayanti. 2011. *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberasilan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

SK BAZNAZ Kabupaten Kota. dalam http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/II.3.%20SK%20BAZNAS%20kabupaten%20kota.pdf, diakses pada 13 Juni 2017

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta.

Yoserizal. 2011. *Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat*. "Skripsi"—Universitas Andalas, Padang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id